

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC BUDGETING DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

Zaini Juniansyah

Dalimunthe

NPP. 29.0336

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Keuangan Publik

Email: zainijd.222@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) :The author focuses on how a regional autonomy provides opportunities and flexibility for each region to organize its government independently, including in managing regional finances, so that the Riau Islands Provincial Government makes a new program breakthrough related to online , namely electronic budgeting. **Objectives**: The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the implementation of electronic budgeting in the preparation of the regional government budget of Batam City. **Methods**: This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the theory of effectiveness of computer-based systems from Kenneth C. Laudon & Jane Laudon. Data collection techniques using interviews, documentation and observation. **Result/ Finding**: The findings obtained by the author in this study are electronic budgeting which are quite difficult to operate. Then there are no technical instructions (modules) regarding the procedures for budgeting and operating the electronic budgeting system. **Conclusions**: The effectiveness of the implementation of electronic budgeting in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget of DKI Jakarta Province is still not effective because there are obstacles caused by several factors. Efforts made by the Regional Financial Management Agency in overcoming these obstacles by coordinating with relevant agencies both vertically and horizontally.

Keywords : Effectivity, System, Electronic Budgeting.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penulis berfokus pada bagaimana suatu otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri termasuk dalam mengelola keuangan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuat terobosan program baru berkaitan dengan penyusunan anggaran yang bersifat online yaitu *electronic budgeting*. **Tujuan**: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan *electronic budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan pemerintah daerah Kota Batam. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori efektivitas sistem berbasis komputer dari Kenneth C. Laudon & Jane Laudon. Teknik pengumpulan data dengan

menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/ Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu program atau perangkat lunak (*software*) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan. Kemudian tidak adanya petunjuk teknis (modul) mengenai tata cara penyusunan anggaran dan pengoperasian sistem *electronicbudgeting*.

Kesimpulan: Efektivitas pelaksanaan *electronic budgeting* dalam penyusunan Anggaran Keuangan di BPKAD Kota Batam masih belum efektif karena ada kendala yang disebabkan beberapa faktor. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem, *Electronic Budgeting*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya salah satu virus yang merupakan penyebab infeksi saluran pernapasan mulai ringan hingga berat yang dinamakan Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan COVID-19 dimana pelaku utama virus tersebut bernama virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(SARS-Cov-2). Virus ini mulai menyebar di dunia diawali pada daerah Wuhan, China akhir Desember 2019 dan menyebar dengan cepat keseluruh belahan dunia yang lain. (WHO, 2020)

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 menghasilkan perubahan yang sangat penting yaitu dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan juga pergeseran yang pokok dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, kewenangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat untuk mengendalikan pemerintah daerahnya sendiri. Kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhannya, yang tidak melanggar peraturan pemerintah pusat yang berlaku saat ini dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan. Pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang terbilang good governance berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi publik yang terbuka untuk mencapai tujuan pembangunan, Negara Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan hal ihwal pemerintahan untuk daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Asas otonomi daerah yaitu merupakan asas dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasari oleh otonomi daerah, dengan memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Setiap daerah memiliki peluang atau kuasa untuk melaksanakan otonomi daerah dan juga bertanggung jawab secara proporsional untuk daerah. Selain itu, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah supaya sumber daya keuangan yang ada, bisa dikelola untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan Pengawasan Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur membuat sebuah program pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Pemerintah Kepulauan Riau adalah satu dari beberapa daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi (*electronic budgeting*) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan penganggaran yang dihadapi oleh pemerintah ketika menghadapi Bencana Non Alam seperti COVID - 19 ini menyebabkan tidak stabilnya perkembangan ekonomi yang mewajibkan pemerintah melakukan *refocusing* serta realokasi anggaran.

Pada sesi penatausahaan serta pertanggungjawaban ada kasus pencatatan pada Belanja Tidak Terduga ialah tidak terdapatnya juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga serta penentuan batas belanja dalam keadaan darurat dan mendesak serta tidak ada data mengenai penyaluran dana bagi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang terdampak COVID - 19

Dalam penerapannya masih terdapat beberapa instansi yang mengalami kesulitan di dalam pemasukan data anggaran, hal ini disebabkan waktu yang sangat singkat dalam menginput data, mengingat percepatan anggaran yang dilakukan dalam hal mendesak, hal ini mengakibatkan yang lambatnya proses siklus keuangan. Ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang mengerti tentang pengoperasian sistem Electronic Budgeting ini sangat terbatas, sehingga tidak jarang dalam proses pemasukan data secara electronic hanya orang itu saja yang mengerjakan proses pemasukan data sehingga dapat memperlambat anggaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Oni Permatasari berjudul Implementasi Electronic Budgeting di Era Pandemi COVID - 19 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, menemukan bahwasannya pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi, karena pelaksanaan anggaran di Pemkot Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun dan belum optimal.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Gunawan yang berjudul Penerapan Sistem Electronic Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik, penelitian ini menjelaskan bahwasannya perlu dilakukan implementasi dan peningkatan implementasi sistem anggaran di sektor publik. (Gunawan, 2020)

Penelitian berikutnya yaitu dari Ningsih yang berjudul Analisis Penerapan Electronic Planning dan Electronic Budgeting Pada Pemerintahan Daerah, yang berkesimpulan bahwasannya peningkatan lebih lanjut dari pengembangan dan peningkatan sistem, kualitas sumber daya manusia dan inovasi diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik melalui penganggaran. (Ningsih,2020)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang memfokuskan pada keefektifan dalam mengoperasikan sistem *Electronic Budgeting* selama pandemi COVID - 19 yang menimpa bangsa di Dunia dalam kategori Bencana Non Alam sedangkan dalam penelitian Oni Permatasari menegaskan pada prosedur pelaksanaan *Electronic Budgeting* selama pandemi COVID - 19. Kemudian pada penelitian berikutnya meneliti tentang realisasi dan akuntabilitas serta transparansi *Electronic Budgeting* sedangkan peneliti melakukan penelitian secara menyeluruh. Virgiana Ningsih melakukan penelitian tentang penerapan *Electronic Planning* dan *Electronic Budgeting* dalam terwujudnya siklus pengelolaan keuangan yang baik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Electronic Budgeting dalam penyusunan anggaran keuangan khususnya selama pandemi COVID 19 di Kota

Batam serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dari *Electronic Budgeting* tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan program *Electronic Budgeting* ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala BPKAD Kota Batam, Sekretaris BPKAD Kota Batam, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Operator *Electronic Budgeting*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pelaksanaan *Electronic Budgeting* dalam penyusunan Anggaran Keuangan di BPKAD Kota Batam menggunakan teori dari Kenneth C. Laudon & Jane Laudon. Teori tersebut memiliki 4 dimensi efektivitas sistem berbasis komputer yaitu Organisasi, Manajemen, Keahlian, dan Teknologi.

3.1 Organisasi

Salah satu indikator didalam organisasi adalah pembagian kerja dimana pegawai di BPKAD Kota Batam semua terlibat di dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Hal ini menandakan bahwa para pegawai telah paham akan tugas dan fungsi yang telah diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian pada indikator koordinasi dimana dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, koordinasi sering merupakan suatu proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, dan kepada komunikator lain sering terjadi permasalahan. Penyusunan e-budgeting melibatkan berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sehingga komunikasi antar instansi harus berjalan dengan baik. Maka dari itu, BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam proses penyusunan anggaran melalui *Electronic Budgeting* telah melakukan koordinasi kepada setiap SKPD supaya tidak ada lagi kesalahan dalam proses penginputan sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya kurangnya koordinasi memang masih menjadi kendala pada penyusunan APBD sehingga koordinasi antara pegawai di BPKD belum maksimal.

Selanjutnya dalam dimensi organisasi terdapat indikator sumber daya manusia dimana Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelaksanaan sistem *electronic budgeting* harus memiliki keterampilan serta pemahaman terhadap sistem komputerisasi sehingga dalam pengoperasian sistem *electronic budgeting* ini dapat memasukan komponen dalam anggaran belanja dengan benar serta kode rekening didalam suatu kegiatan yang diajukan. Namun pada kenyataannya dimana pegawai pada BPKAD Kota Batam memiliki keterampilan mengenai pengoperasian komputer, namun ada juga yang belum berkompeten pada bidangnya. Adapun permasalahan lain yaitu jika terdapat revisi, akan sangat memerlukan tenaga yang ekstra sehingga itu juga menjadi salah satu kendala dalam hal sumber daya manusia.

3.2 Manajemen

Pada dimensi manajemen indikator keterbukaan informasi, Badan pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kota Batam telah menerapkan indikator tersebut dengan baik. Pada pernyataan tersebut, penulis menggaris besarkan bahwa BPKAD Kota Batam mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mencegah peluang para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penyelewengan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya website bpkad.batam.go.id yang menyajikan data dan Analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan platform interaktif yang dapat diakses oleh seluruh warga Batam. Sehingga indikator mutu/kualitas ini masih belum efektif dalam pencapaiannya. Selanjutnya pada indikator kontrol pimpinan menunjukkan bahwa dalam kontrol pimpinan merupakan unsur penting dalam keberlangsungan organisasi agar lebih tertata.

Badan Pengelola Keuangan Daerah telah menerapkan dengan baik indikator kontrol pimpinan. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya id dan password dari pimpinan kepada bendahara pengeluaran untuk mempermudah melakukan pembayaran. Maka dari itu, dapat dikatakan kontrol pimpinan berjalan dengan baik. Kemudian pada indikator kesesuaian standar operasional prosedur dimana bahwa buku pedoman dalam bentuk buku memang belum ada namun dalam pelaksanaannya sudah ada dilakukannya pelatihan serta sosialisasi tentang pelaksanaan sistem kerja Electronic Budgeting sampai pengoperasian sistem tersebut.

3.3 Teknologi

Pada indikator kemampuan sistem dalam mengantisipasi akses pihak yang tidak berkepentingan dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam telah menerapkan teori tersebut dimana dengan diterapkannya sistem electronic budgeting ini data yang telah diinput oleh sistem tidak dapat diutak-atik kembali. Anggaran yang telah disusun dapat terjamin keamanannya karena terdapat laman sign in yang hanya dimiliki oleh Kepala SKPD dan bendahara di SKPD tersebut. Dengan adanya laman sign in, pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat masuk dan juga akses tersebut tidak sembarangan diakses oleh orang yang tidak bertanggungjawab terhadap data tersebut. Kemudian dalam penyampaian informasi bahwa yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan teori Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon pada dimensi teknologi, dimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik

3.4 Keahlian

Pada dimensi keahlian terdapat indikator kriteria penerapan pegawai dimana kriteria penetapan pegawai dilakukan dengan melihat bagaimana kinerja pegawai tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu penetapan pegawai dari awal memang sudah ditetapkan masing-masing jadi mereka sudah bekerja dengan tupoksinya masing-masing. Selanjutnya pada indikator peningkatan keahlian pegawai terhadap sistem informasi dan teknologi bahwa pegawai sudah 60% menguasai teknologi, tinggal sedikit mengikuti pelatihan sehingga keahlian pegawai dapat dikatakan maksimal.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program Electronic Budgeting ini memberikan dampak positif selain bagi BPKAD Kota Batam juga bagi masyarakat sendiri. Dikarenakan program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memantau serta mengetahui tentang rancangan anggaran yang akan dibuat oleh pemerintah setempat. Selain itu, manfaat dari adanya Electronic Budgeting ini adalah sebagai inovasi baru untuk mempermudah berjalannya roda pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Oni Permatasari namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu situs atau website electronic budgeting yang terkadang sulit di akses serta minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mengelola dan mengoperasikan Electronic Budgeting.

Selain itu, program Electronic Budgeting ini berbeda dari penelitian Dimas Rizky Gunawan dimana penelitian ini lebih kepada penilaian sistem sehingga dapat dilihat efektif atau tidaknya pelaksanaan dari electronic budgeting.

Efektivitas pelaksanaan Electronic Budgeting ini tergolong baru sehingga masih banyak harus diperbaharui serta ditingkatkan untuk dapat memperkuat sistem didalamnya seperti temuan dari Oni Permatasari, Dimas Rizky Gunawan, dan Virgiana Ningsih.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam efektivitas pelaksanaan electronic budgeting ini yaitu program atau perangkat lunak (software) electronic budgeting yang cukup sulit dioperasikan. Selanjutnya tidak adanya petunjuk teknis (modul) mengenai tata cara penyusunan anggaran dan pengoperasian sistem electronic budgeting . Selain itu situs atau website electronic budgeting yang terkadang sulit diakses dan minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola dan mengoperasikannya.

IV. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan Electronic Budgeting ini belum berjalan efektif faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah program atau perangkat lunak (software) electronic budgeting yang cukup sulit dioperasikan. Tidak adanya petunjuk teknis (modul) mengenai tata cara penyusunan anggaran dan pengoperasian sistem electronic budgeting. Situs atau website electronic budgeting yang terkadang sulit di akses. Minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mengelola dan mengoperasikan electronic budgeting. Guna mengatasi hambatan tersebut BPKAD Kota Batam melakukan upaya yaitu Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal ataupun membuat jadwal untuk akses kedalam sistem Electronic Budgeting supaya tidak lelet ketika mengoperasikannya karena keterbatasan server. Melakukan konsultasi terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran melalui sistem electronic budgeting dengan pihak konsultan electronic budgeting yang telah ditunjuk.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Kenneth C. Laudon & Jane Laudon.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Electronic Budgeting untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- World Health Organization. "World Health Organization (Kasus COVID - 19 Di Indonesia)." *Www.Covid19.Who.Int*. Last modified 2021. Accessed September 11, 2021. <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>.
- Laudon, Kenneth C, and Jane P Laudon. "Management Information Systems Managing The Digital Firm Thirteen Edition Global Edition (SIB)" (2014): 175.
- Miles, Matthew, and Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Edited by Rebecca Holland. Second Edi. California, 1994.
- Gunawan. "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 4, no. 2 (2020): 183-193.
- Andhini, Nisa Fitri. "Sistem Penganggaran Pemerintah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689-1699.
- ANNET, NAMAYANJA. "Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014" (2014).
- Ningsih, Virgiana. "Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)" 4, no. 1 (2021): 33-48.
- Daerah, Keuangan, and Tahun Anggaran. "BERITA NEGARA," no. 655 (2020).
- Ellison, Carol. *McGraw-Hill's Concise Guide to Writing Researches Paper*. New York, 2021.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Sinurat, Marja. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edited by Y. Sartika. Jakarta: GHALIA INDONESIA, 2018.
- — —. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edited by Y Sartika. Jakarta: GHALIA INDONESIA, 2018.
- Sopannah, Ana, and M Si Ak. "" Effective Training and Inspiring ' DALAMRANGKA PENANGANAN COVID-19" (n.d.).
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.
- World Health Organization. "World Health Organization (Kasus COVID - 19 Di Indonesia)." *Www.Covid19.Who.Int*. Last modified 2021. Accessed September 11, 2021. <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>.
- Yuliana, Y. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187-192